

Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Kalianak Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya

Riza Sajuwitaningtyas¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This research aimed to determine the factors that militate participation of beneficiaries Economic Empowerment Program on Self-Help Groups in the Kalianak, District Asemrowo, Surabaya. To achieve this, the research uses explorative qualitative research method with data collection techniques snowball to get six informant. The data were analyzed by the technique of triangulation. The results found that not being sure to gain benefits; bad and undemocratic leadership of community groups; lack of personal trust; lack of the education and skills level; less well-targeted and unplanned program; and lack of commitment by the companion are militates participation of beneficiaries Economic Empowerment Program on Self-Help Groups in the Kalianak Village, District Asemrowo, Surabaya.

Key words: Militate Factors, Beneficiaries' Participation, Economic Empowerment Program, Self-Help Groups

Pendahuluan

Istilah partisipasi pada proses pembangunan mulai dikenal sekitar tahun 1970-an akibat adanya kegagalan terhadap pendekatan *top-down* dimana keputusan/program pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah kurang responsif terhadap kebutuhan, keinginan, dan aspirasi masyarakat. Akibatnya, banyak keputusan/program pembangunan yang ada belum mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan.

Partisipasi kini telah menjadi konsep yang populer dan telah banyak diterapkan dalam berbagai proses pembangunan dengan harapan agar kebijakan/program pembangunan yang dibuat dapat lebih efektif karena berdasar pada aspirasi, kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi meski partisipasi masyarakat telah disediakan sedemikian luas, hal tersebut tidak secara otomatis menstimuli keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses pembangunan.

Permasalahan mengenai ketidakefektifan partisipasi masyarakat pada program pembangunan, salah satunya contohnya dapat dilihat dalam Program Pemberdayaan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Program Pemberdayaan Ekonomi ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Surabaya dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Pemberdayaan Ekonomi pada intinya bermaksud untuk mengembangkan kemampuan teknis produksi perempuan keluarga miskin (gakin) yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diharapkan dapat dijadikan bekal usaha guna meningkatkan pendapatan (*income*). Pengembangan

kemampuan yang dimaksud dilakukan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan.

Akibat ketidakefektifan partisipasi masyarakat penerima manfaat program, salah satu hasil yang diharapkan dari program ini, yakni menumbuhkan kelompok usaha belum dapat menunjukkan capaian yang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya KSM yang berstatus tidak berkembang di berbagai wilayah. Salah satu wilayah yang memiliki permasalahan ini adalah Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Persentase Tertinggi KSM Tidak Berkembang

No.	Nama Kelurahan	Jumlah KSM Tidak Berkembang	Total KSM	Persentase (%)
1.	Kalianak	1	1	100
2.	Tambak Langon	2	2	100
3.	Karang Pilang	3	3	100
4.	Kebraon	5	5	100
5.	Kedurus	5	5	100
6.	Lidah Kulon	2	2	100
7.	Krengangan Utara	4	4	100
8.	Genteng	2	2	100

Sumber: Rekap KSM Pelatihan Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2013, diolah

Menariknya, di wilayah ini angka kemiskinan di wilayah ini tergolong paling tinggi dibanding 7

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

kelurahan lainnya yang memiliki persentase tertinggi KSM tidak berkembang tetapi justru program Pemkot Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian justru tidak mampu mendorong partisipasi penerima manfaat secara efektif didalamnya.

Tabel 2. Persentase Keluarga Miskin Di Kota Surabaya Tahun 2012

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Gakin	Total Keluarga Seluruhnya	Persentase (%)
1.	Kalianak	224	444	50,45
2.	Tambak Langon	235	598	39,30
3.	Karang Pilang	-	2.620	-
4.	Kebraon	-	6.351	-
5.	Kedurus	-	5.924	-
6.	Lidah Kulon	1.103	4.014	27,47
7.	Krembangan Utara	-	3.962	-
8.	Genteng	49	3.163	1,55

Sumber: Kecamatan Asemrowo; Karang Pilang; Lakarsantri; Pabean Cantian; Genteng dalam Angka 2012, 2013, diolah

Keterangan:

- : data tidak tersedia

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merumuskan permasalahan berupa faktor-faktor apa sajakah yang menghambat partisipasi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada KSM di Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada KSM di Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Penelitian ini juga dilakukan dengan rmanfaat untuk memberi kontribusi akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Memberi kontribusi teoritis dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dan pihak-pihak yang terlibat pada Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dalam menyusun strategi sehingga capaian program yang diharapkan di wilayah ini dapat lebih optimal dan efektif.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Penerima Manfaat

Partisipasi oleh Keith Davis (dalam Huraerah, 2008:95) didefinisikan "*as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and shared responsibility for them*". Rahnama (dalam Arif, 2012:45) mendefinisikan partisipasi sebagai "*the action or fact of partaking, having or forming a part of*". Dan White (dalam Sastropetro, 1985:32) mendefinisikan partisipasi adalah "*involvement of the local population actively in the decision making of development projects or in their implementation*". Dari berbagai pendapat mengenai pengertian partisipasi, kata kunci partisipasi terletak pada peran serta atau keikutsertaan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab, baik secara fisik, emosi maupun mental guna mencapai tujuan bersama.

Sedangkan penerima manfaat menurut Mardikanto (dalam Mardikanto & Soebianto, 2013:130) dimaknai sebagai:

- (1) Berbeda dengan kedudukannya sebagai "sasaran", masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator, dan pemangku kepentingan yang lain.
- (2) Penerima manfaat bukanlah obyek atau sasaran tembak yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan kerja dalam mensukseskan pembangunan.
- (3) Berbeda dengan kedudukannya sebagai sasaran yang tidak punya pilihan atau kesempatan untuk menawar setiap materi yang disampaikan, selain harus menerima/mengikutinya, penerima manfaat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya.
- (4) Penerima manfaat tidak berada dalam posisi di bawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan yang setara bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud partisipasi penerima manfaat dalam penelitian ini adalah peran serta atau keikutsertaan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab, baik secara fisik, emosi maupun mental yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima manfaat dari suatu kegiatan guna mencapai tujuan.

Adapun faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi penghambat partisipasi penerima manfaat pada penelitian ini menggunakan elaborasi dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas, yakni berupa:

1. Tidak adanya keyakinan akan manfaat yang diperoleh

Angba & Itari (2012) mengemukakan bahwa salah satu penghambat partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial/kemasyarakatan dikarenakan tidak adanya keyakinan akan manfaat yang diperoleh. Manfaat di sini diterjemahkan sebagai keuntungan. Kondisi ini selaras dengan

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

pendapat World Bank (dalam Angba & Itari, 2012:57) yang menyebutkan bahwa “manfaat partisipasi berhubungan dengan alasan partisipasi”. Artinya, ketika masyarakat merasa bahwa terdapat manfaat dari keikutsertaan yang mereka lakukan sesuai dengan alasan mereka berpartisipasi, maka partisipasi mereka dalam suatu kegiatan akan efektif, demikian pula sebaliknya. Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, tidak adanya keyakinan akan manfaat yang diperoleh dapat menghambat partisipasi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada KSM apabila penerima manfaat tidak memiliki kepercayaan terhadap keuntungan yang didapatkan terhadap aktivitas tersebut.

2. Gaya kepemimpinan kelompok

Dalam kelompok atau organisasi, pemimpin memiliki posisi yang penting sebab pemimpin berperan untuk memandu serta memotivasi anggotanya guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Agar pemimpin dapat menjalankan perannya dengan baik, pemimpin harus memiliki karakter sebagai pemimpin. Kirkpatrick & Locke (dalam Robbins, 2003:433) menyebutkan ada enam karakter yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin, yakni “ambisi dan semangat, hasrat memimpin, kejujuran, integritas, kepercayaan diri, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan tentang pekerjaan”. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kirkpatrick & Locke, dapat diketahui bahwa salah satu karakter pemimpin adalah kepercayaan diri. Tanpa adanya rasa percaya diri yang kuat, seorang pemimpin lebih kecil kemungkinannya membuat upaya mempengaruhi, dan setiap upaya mempengaruhi yang dilakukan akan lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil” (Yukl, 2001:223).

Selain karakter pemimpin, hal lain yang menentukan keefektifitasan pemimpin adalah gaya kepemimpinan. Hal ini selaras dengan pendapat Fiedler (dalam Robbins, 2003:440) yang meyakini “faktor kunci keberhasilan kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dasar individu”. Hal ini didukung oleh temuan Ahmadu et al. (2012) yang menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan kelompok yang baik dan demokratis merupakan salah satu faktor yang mampu memotivasi penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial/kemasyarakatan.

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang dilakukan pemimpin pada saat mencoba mempengaruhi perilaku yang dipimpinnya (Nadhir, 2009:23). Lebih lanjut, Blanchard (dalam Nadhir, 2009:22) mengkategorikan gaya kepemimpinan menjadi 4, yakni:

- a. Gaya kepemimpinan memerintahkan (*telling*), yakni kepemimpinan yang tampak bilamana sang pemimpin harus lebih banyak memberi perintah atau arahan daripada dukungan.
- b. Gaya kepemimpinan mengajak (*consulting*), yakni gaya kepemimpinan bilamana seorang pemimpin banyak memberikan perintah serta

diimbangi dengan banyak dorongan dan motivasi.

- c. Gaya kepemimpinan melibatkan (*participating*), yakni gaya ini terlihat bilamana seorang pemimpin lebih banyak menghabiskan waktu dalam memberikan dorongan dan motivasi serta begitu banyak memikirkan detail-detail pekerjaan.
- d. Gaya kepemimpinan melimpahkan (*delegating*), dalam gaya ini seorang pemimpin praktis tidak harus mempunyai keterampilan teknis, dia hanya perlu memberikan pengarahan serta dorongan secara insidental, karena bawahannya mampu bekerja secara mandiri dan telah mendapat otorisasi yang memadai.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa baik-buruknya gaya kepemimpinan ditentukan oleh ada-tidaknya kesesuaian antara upaya yang dilakukan oleh pemimpin (memerintah dan/atau mengajak dan/atau melibatkan dan/atau mendelegasikan yang dipimpinnya) dengan sikap yang dimiliki oleh yang dipimpinnya.

Adapun kepemimpinan yang demokratis adalah kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri, sebagai berikut.

- a. Rencana kerja dan semua kebijaksanaan merupakan wewenang bersama untuk didiskusikan dan diputuskan bersama, tentu saja dibimbing dan dibantu pimpinan.
- b. Apa yang dilakukan kelompok ditentukan dan dirumuskan dalam pertemuan kelompok. Pimpinan hanya melontarkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan untuk dipikirkan dan diputuskan oleh kelompok. Selanjutnya pemimpin hanya melakukan apa yang telah diputuskan kelompok.
- c. Anggota kelompok bebas menentukan jenis usaha atau kegiatan sendiri.
- d. Komunikasi pemimpin dan yang dipimpin berjalan dua arah. Setiap persoalan baru sedapat mungkin dibicarakan dengan anggota atau wakil para anggota, sehingga partisipasi anggota selalu dinomorsatukan (Nadhir, 2009:21).

Hal ini berarti ketika pemimpin tidak mendiskusikan, tidak memutuskan dan tidak melibatkan segala keputusan kelompok secara bersama-sama serta tidak memberikan kebebasan anggotanya untuk menentukan pilihannya maka dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan yang tidak demokratis.

Berdasarkan pembahasan di atas, gaya kepemimpinan kelompok yang dapat menghambat partisipasi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada KSM apabila gaya kepemimpinan kelompok tidak baik dan tidak demokratis. Gaya kepemimpinan kelompok yang tidak baik dapat dilihat dari tidak adanya

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

kesesuaian antara upaya yang dilakukan pemimpin (memerintah dan/atau mengajak dan/atau melibatkan dan/atau mendelegasikan yang dipimpinnya) dengan sikap yang dimiliki oleh yang dipimpinnya. Sedangkan gaya kepemimpinan yang tidak demokratis dapat dilihat apabila pemimpin tidak mendiskusikan, tidak memutuskan dan tidak melibatkan segala keputusan kelompok secara bersama-sama serta tidak memberikan kebebasan anggotanya untuk menentukan pilihannya.

3. Kepercayaan diri

Rasa percaya diri (*trust*) adalah konsep yang memiliki dua komponen, yakni (1) komponen emosional yang disebutkan sebagai antisipasi yang diyakinkan dan harapan yang penuh kepercayaan dan (2) komponen intelektual yang didasarkan pada sekumpulan rekaman mengenai performansi yang mengonfirmasikan rasa percaya tersebut (Sutrisno, 2010:198). Percaya terhadap diri sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat (Sastropoetro, 1985:22). Hal ini juga didukung oleh pendapat Slamet (dalam Mardikanto & Soebianto, 2013:91-95) yang menyebutkan bahwa salah satu unsur tumbuh dan berkembangnya partisipasi ditentukan oleh kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, yang menyangkut sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuan untuk memperbaiki mutu hidupnya. Konsistensi hubungan sikap dan perilaku dapat dipengaruhi oleh: (1) kuat/lemahnya sikap yang dimiliki oleh seseorang dan (2) faktor situasional yang menghambat seseorang untuk berperilaku sesuai dengan sikap yang dimilikinya (Wibowo, 2009:89). Artinya, apabila masyarakat memiliki sikap percaya diri terhadap aktivitas yang dilakukannya, ia akan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan pembahasan di atas, sikap kepercayaan diri dapat menghambat partisipasi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada KSM apabila tidak adanya harapan positif yang penuh keyakinan dalam diri penerima manfaat terhadap aktivitas yang akan ataupun sedang dijalankan.

4. Tingkat pendidikan dan keterampilan

Slamet (dalam Mardikanto & Soebianto, 2013:91-95) menyebutkan bahwa salah satu unsur tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat ditentukan oleh kemampuan masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan. Hal ini juga selaras dengan Angba & Itari (2012) yang memberikan kesimpulan “petani miskin dan kurang berpendidikan, mereka akan memiliki partisipasi rendah dalam organisasi sosial/kemasyarakatan”.

Proses pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan (Notoatmodjo, 2009:27). Maka apabila masyarakat tidak memiliki pendidikan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya, mereka akan menjadi kurang terampil sehingga dapat menghambat mereka untuk

berpartisipasi pada aktivitas tersebut. Pernyataan ini juga selaras dengan pendapat yang menyebutkan “terdapat kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan” (Robbins, 2003:52).

Berdasarkan penjelasan di atas, tingkat pendidikan dan keterampilan dapat menghambat partisipasi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada KSM apabila tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penerima manfaat tergolong rendah dan terdapat ketidakmampuan dalam menjalankan pekerjaannya.

Pemberdayaan Ekonomi

Maathai (2009) mengartikan bahwa pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan “kapasitas perempuan dan laki-laki untuk melakukan kontrol atas mata pencaharian mereka melalui kemampuan mereka untuk membuat pilihan tentang keterlibatan dan investasi mereka dalam kegiatan produktif apa, memutuskan bagaimana dan kapan mereka terlibat dalam pasar dan mempengaruhi persyaratan dalam pilihan yang mereka lakukan”.

Menurut N. Kabeer (dalam BBA; Dip KIM; MBA Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Kenya, 2013:387), yang dimaksud pemberdayaan ekonomi adalah

The expansion of individual choice and capacities for self-reliance in terms of having access to and control over the means to make a living on a sustainable and long term basis, and receiving the material benefits of this access and control. It also involve broadening their skills and knowledge.

Dari ke-2 pendapat tersebut, maka yang dimaksud Program Pemberdayaan Ekonomi dalam penelitian ini adalah merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat menentukan pilihan atas tindakan yang mereka lakukan sendiri guna mendapatkan sumber-sumber ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya.

Pemberdayaan umumnya memiliki sejumlah unsur tertentu. Adapun unsur pemberdayaan tersebut terdiri atas:

1. Pendampingan

Pendampingan adalah bagian dari komponen lembaga, instansi, atau dunia usaha dalam proses pemberdayaan.

2. Wahana Pemberdayaan

Yang dimaksud wahana pemberdayaan adalah sebagai wadah proses pemberdayaan masyarakat, yaitu Lembaga/Kelompok Masyarakat, jenis dan bentuk kelompok itu sendiri sesuai dengan program yang dilaksanakan.

3. Kegiatan Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam program pemberdayaan tersebut, diantaranya:

a. Pendampingan, jika kelompok baru tumbuh atau akan ditumbuhkan, ada beberapa pelatihan pokok yang perlu

diberikan kepada anggota, yaitu (1) dasar-dasar kelompok (materi: pengorganisasian dan administrasi); (2) Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga dan Motivasi Usaha. Selanjutnya melakukan bimbingan dan konsultasi, antara lain: (1) Organisasi, administrasi keuangan, dan pengembangan permodalan; (2) Manajemen Usaha Kecil. Jika anggota memulai usaha maka peran pendamping sangat besar, terutama bagaimana mendampingi anggota membuat analisis kelayakan usaha. Pendamping diharapkan bisa menjadi “mediator” terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran.

- b. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah kegiatan secara keberlanjutan dan mandiri melayani masyarakat miskin dengan sistem akseptasi sosial (Nadhir, 2009:3-8).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa unsur pemberdayaan terdiri atas pendamping, wadah pemberdayaan, dan kegiatan pemberdayaan. Dalam pemberdayaan, pendamping memiliki fungsi sebagai:

- a. Pelayan, yakni memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pemberdayaan.
- b. Inovator, yakni fasilitator harus mampu menggerakkan dan mengajak masyarakat binaan dengan cara-cara tertentu agar ada perubahan sikap dan pola pikirnya sebab mereka biasanya pendidikan dan pengalamannya rendah sehingga mereka susah diajak berpikir kritis, apalagi diajak merubah pola berpikir ke arah yang lebih berkembang lagi. Mereka umumnya mudah merasa puas, walaupun hak-haknya dilanggar oleh orang lain.
- c. Motivator, maksudnya fasilitator dapat memberikan motivasi, tidak hanya berlangsung pada saat kejenuhan terjadi tetapi selama proses berjalan sebab motivasi naik-turunnya motivasi tidak dapat diketahui.
- d. Konsultan, maksudnya fasilitator harus dapat berfungsi sebagai konsultan masyarakat sebab ilmu pengembangan masyarakat di sini belum ada.
- e. Dinamisator, maksudnya fasilitator wajib memiliki pola pikir pembaharu dalam bidang pengembangan masyarakat, imajinasi dan daya kreasi serta kemampuan memandang ke depan (Nadhir, 2009:31-32).

Lebih jauh, Dahama & Bhatnagar (dalam Slamet & Mardikanto, 2013:106) menyebutkan bahwa pemberdayaan harus menganut prinsip:

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.

3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sarannya.
7. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
8. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya) sarannya.
9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
10. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
11. Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
12. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

KSM

KSM merupakan kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama (P2KP, 2012:7).

Menurut Panda (dalam BBA; Dip KIM; MBA Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Kenya, 2013:385), yang dimaksud dengan KSM adalah

A small group of people ranging from 10 to 20, from rural, semi urban and urban areas, who come

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

together with the intention of solving their common socio-economic problem through regular savings and having access to credit, which in turn leads to the generation of livelihood and assurance of certain degree of self-sufficiency among the members.

Dari pengertian tersebut, maka pengertian KSM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wadah yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksploratif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kelurahan Kalianak tercatat sebagai salah satu kelurahan yang memiliki persentase tertinggi KSM yang tidak berkembang di Kota Surabaya (Tabel 1). Selain itu, kelurahan ini memiliki jumlah gakin tertinggi dibanding 7 kelurahan lain yang memiliki persentase tertinggi KSM yang tidak berkembang di Kota Surabaya (Tabel 1.2). Akan tetapi di sisi lain, program Pemkot Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian gakin di wilayah ini justru tidak mendorong penerima manfaat untuk berpartisipasi didalamnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*snowball*) sampai mendapatkan enam orang informan. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif Miles & Huberman. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan cara (1) membandingkan informasi maupun data dari berbagai informan yang telah ditetapkan sebelumnya, (2) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan (3) membandingkan informasi yang diberikan oleh informan dengan dokumen-dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan menunjukkan bahwa penerima manfaat meyakini bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan dengan cara mengembangkan KSM menjadi kelompok usaha dengan produk hasil pelatihan keterampilan tidak akan mendatangkan manfaat ekonomi. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan antara produk hasil pelatihan keterampilan dengan produk sejenis yang beredar di pasaran. Adapun perbedaan yang dimaksud dalam hal ukuran, harga, kualitas, merek, serta kemasan. Adanya perbedaan ini memunculkan keyakinan bahwa produk hasil pelatihan keterampilan yang harus dikembangkan sebagai produk usaha KSM tidak akan laku untuk dijual sehingga tidak akan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Akibatnya, penerima manfaat menjadi enggan untuk berpartisipasi pada KSM yang tercermin dari tidak adanya usaha produktif yang dilakukan oleh penerima manfaat pada KSM.

Temuan ini didukung dengan temuan Angka & Itari (2012) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat partisipasi disebabkan karena tidak adanya keyakinan akan manfaat yang diperoleh (*not being sure to gain benefits*), terutama yang berkaitan dengan alasan ekonomi. Hal ini mengandung pengertian ketika penerima manfaat tidak yakin bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan dengan cara mengembangkan KSM menjadi kelompok usaha dengan produk hasil pelatihan keterampilan yang telah diberikan mampu mendatangkan manfaat ekonomi bagi mereka, maka partisipasi mereka pada KSM menjadi tidak efektif.

Adanya keyakinan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan dengan cara mengembangkan KSM menjadi kelompok usaha dengan produk hasil pelatihan keterampilan tidak akan mendatangkan manfaat terutama yang berkaitan dengan alasan ekonomi, muncul suatu keinginan dari penerima manfaat untuk mengganti materi pelatihan keterampilan yang dianggap dapat dikembangkan sebagai usaha KSM pada saat kegiatan pendampingan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya penerima manfaat tidak tertarik untuk mengembangkan hasil keterampilan yang telah diberikan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi sebagai produk usaha KSM.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan tidak terencana dengan baik karena telah terjadi ketidaksesuaian antara materi pelatihan keterampilan yang diberikan dengan keinginan atau minat dan kebutuhan penerima manfaat. Adanya ketidaksesuaian antara materi pelatihan keterampilan yang diberikan dengan minat dan kebutuhan penerima manfaat kemudian berdampak pada terhambatnya partisipasi mereka pada KSM yang tercermin dari keengganan penerima manfaat melakukan usaha produktif KSM. Alhasil, salah satu hasil yang diharapkan dalam program ini, yakni menumbuhkembangkan KSM menjadi kelompok usaha menjadi tidak efektif. Pendapat ini didukung oleh pendapat Dahama & Bhatnagar (dalam Slamet & Mardikanto, 2013:106) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, kegiatan pendampingan yang diharapkan oleh penerima manfaat terpaksa tidak bisa dilakukan sebab adanya kesibukan pendamping pelatihan. Akibat tidak adanya kegiatan pendampingan, otomatis tidak ada penggantian materi pelatihan keterampilan sehingga penerima manfaat tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi KSM yang tercermin dari keengganan penerima manfaat untuk melakukan kegiatan usaha produktif KSM.

Jika merujuk pada Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Tahun 2013, penetapan dan pemilihan tenaga pendamping pelatihan salah satunya didasarkan atas kriteria sanggup melakukan pendampingan peserta latih. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan dan penetapan tenaga pendamping pelatihan kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang mana hal tersebut dapat ditunjukkan

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

dengan rendahnya komitmen tenaga pendamping pelatihan untuk melakukan pendampingan pada penerima manfaat yang tergabung dalam KSM di Kelurahan Kalianak. Padahal pendamping memegang fungsi yang penting dalam pemberdayaan, salah satunya adalah sebagai pelayan, yakni memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pemberdayaan (Nadhir, 2009:31-32). Hal ini berarti ketika pendamping tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan, yang dalam konteks ini adalah memberikan pendampingan, maka partisipasi penerima manfaat pada Program Pemberdayaan Ekonomi melalui KSM yang terbentuk akan kurang tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi ini dapat terjadi karena pendamping yang seharusnya memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pemberdayaan, termasuk memfasilitasi/memberikan penggantian materi pelatihan keterampilan agar dapat dikembangkan sebagai produk usaha KSM, justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Akibatnya, penerima manfaat kehilangan motivasi untuk berpartisipasi pada KSM.

Lebih jauh, selain program yang tidak terencana dengan baik, temuan di atas juga menunjukkan bahwa program ini kurang tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerima manfaat yang telah berusia lanjut sehingga tidak sesuai dengan kriteria sasaran program tetapi justru tercantum dalam Daftar Pemetik Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak yang berusia 90 tahun.

Jika merujuk pada Program Pemberdayaan Ekonomi tahun 2013, yang dapat menjadi menjadi sasaran adalah perempuan gakin warga Kota Surabaya dengan kriteria usia 19–50 tahun atau lebih yang dianggap masih produktif. Ini jelas menunjukkan program kurang tepat sasaran sekaligus menunjukkan verifikasi daftar calon peserta yang akan tergabung dalam KSM masih menggunakan data lama karena program ini telah mencantumkan kriteria usia sasaran adalah 19-50 tahun atau lebih yang dianggap masih produktif tetapi terdapat penerima manfaat program yang berusia 90 tahun dan tidak produktif.

Usia penerima manfaat yang tergolong lanjut dan tidak produktif ini tentu tidak memungkinkan jika harus mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi sehingga keikutsertaannya sebagai penerima manfaat digantikan pada saat pelaksanaan program. Tidak hanya karena usia, adanya penggantian penerima manfaat dalam program ini juga dapat terjadi akibat penerima manfaat yang sesungguhnya sedang sakit dan sedang bekerja. Peneliti berpendapat adanya penggantian penerima manfaat merupakan salah satu faktor yang menghambat partisipasi penerima manfaat pada KSM. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan alasan antara penerima manfaat sesungguhnya dan penerima manfaat pengganti dalam mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak. Adapun alasan penerima manfaat pengganti mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak adalah untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai pembuatan sabun aroma terapi, sedangkan penerima manfaat sesungguhnya yang

menginginkan adanya peningkatan penghasilan dari adanya program ini.

Kondisi di atas memiliki konsekuensi berupa, ketika penerima manfaat pengganti telah mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi, yakni mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai pembuatan sabun aroma terapi, mereka menjadi kurang atau bahkan tidak termotivasi untuk berpartisipasi lebih jauh pada KSM. Hal ini didukung oleh pendapat World Bank (dalam Angka & Itari, 2012:57) yang menyatakan bahwa “manfaat partisipasi berhubungan dengan alasan partisipasi”. Atau dengan kata lain, partisipasi seseorang ditentukan oleh sejauhmana atau seberapa besar manfaat yang diinginkan dari partisipasinya tersebut.

Tidak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan partisipasi penerima manfaat pada KSM menjadi terhambat berasal dari buruknya gaya kepemimpinan kelompok. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pemimpin kelompok yang tidak pernah berupaya membangkitkan partisipasi anggota, baik melalui perintah dan/atau ajakan untuk melakukan usaha produktif KSM. Akibatnya, anggota kelompok menjadi tidak termotivasi untuk berpartisipasi pada KSM sebab anggota kelompok hanya akan berpartisipasi pada KSM jika pemimpin kelompok mempengaruhi perilaku mereka dengan cara memberikan perintah dan/atau ajakan untuk melakukan kegiatan usaha produktif KSM.

Buruknya gaya kepemimpinan kelompok ini disebabkan karena pemimpin kelompok tidak memiliki ketertarikan pada keorganisasian sehingga beliau kurang memiliki pengetahuan akan pekerjaannya sebagai pemimpin kelompok. Alhasil, ketika ditunjuk sebagai pemimpin kelompok oleh salah satu kader masyarakat setempat, beliau tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin kelompok karena pada dasarnya beliau memang tidak memiliki keinginan menjadi pemimpin kelompok. Pernyataan ini semakin didukung dengan pernyataan “tanpa adanya rasa percaya diri yang kuat, seorang pemimpin lebih kecil kemungkinannya membuat upaya mempengaruhi, dan setiap upaya mempengaruhi yang dilakukan akan lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil” (Yukl, 2001:223).

Selain gaya kepemimpinan yang buruk, faktor lain yang menghambat partisipasi anggota kelompok pada KSM adalah gaya kepemimpinan kelompok yang tidak demokratis. Hal ini dapat ditunjukkan dari pemimpin kelompok yang tidak pernah memberitahukan bantuan modal yang diterima KSM dan tidak pernah melibatkan seluruh anggota kelompok untuk mendiskusikan atau memutuskan penggunaan bantuan modal tersebut. Akibatnya, anggota kelompok tidak mengetahui bahwa KSM mendapat bantuan modal guna mengembangkan kegiatannya dan penggunaan bantuan modal tersebut. Ketidaktahuan ini menjadi penyebab mereka tidak berpartisipasi pada KSM sebab mereka merasa terbebani apabila melakukan usaha produktif KSM dengan modal sendiri.

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

Temuan ini diperkuat dengan temuan Ahmadu et al. (2012) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kelompok yang baik dan demokratis merupakan salah satu faktor yang mampu memotivasi partisipasi penerima manfaat. Demikian sebaliknya, ketika gaya kepemimpinan kelompok tidak baik dan tidak demokratis, penerima manfaat akan kurang atau bahkan tidak termotivasi untuk berpartisipasi pada KSM.

Faktor lain yang ternyata turut menghambat partisipasi penerima manfaat pada KSM di Kelurahan Kalianak adalah rendahnya kepercayaan diri penerima manfaat. Rendahnya kepercayaan diri dari penerima manfaat ini tercermin dari adanya keyakinan penerima manfaat bahwa produk hasil pelatihan keterampilan Program Pemberdayaan Ekonomi tidak akan mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Keyakinan ini tumbuh karena adanya perbedaan antara produk hasil pelatihan keterampilan dengan produk sejenis yang beredar di pasaran sehingga penerima manfaat yang notabene sebagai pembuat produk usaha tersebut saja tidak menyukai produk usaha tersebut apabila dikembangkan. Adapun perbedaan yang dimaksud sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, yakni dalam hal ukuran, harga, kualitas, merek, serta kemasan. Keyakinan ini semakin diperkuat dengan adanya respon negatif dari tetangga penerima manfaat terhadap produk usaha tersebut akibat perbedaan yang dimiliki dengan produk sejenis di pasaran. Adanya sikap ketidakpercayaan diri inilah yang melatarbelakangi penerima manfaat untuk tidak lagi berpartisipasi pada KSM yang ditunjukkan dengan tidak adanya penerima manfaat yang melakukan usaha produktif KSM.

Temuan ini didukung dengan pendapat yang mengungkapkan bahwa percaya terhadap diri sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat (Sastropetro, 1985:22). Konsistensi hubungan sikap dan perilaku ini salah satunya dipengaruhi oleh kuat/lemahnya sikap yang dimiliki oleh seseorang (Wibowo, 2009:89). Hal ini berarti ketika penerima manfaat memiliki sikap ketidakpercayaan diri bahwa produk hasil pelatihan keterampilan yang diberikan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi akan mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran jika dikembangkan, mereka tidak akan berpartisipasi secara efektif pada KSM.

Selain rendahnya kepercayaan diri penerima manfaat, faktor lain yang menghambat partisipasi penerima manfaat pada KSM di Kelurahan Kalianak adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi penyebab terhambatnya partisipasi penerima manfaat pada KSM tercermin dari pengakuan Ibu Wartiah yang merasa kesulitan untuk memasarkan produk usaha hasil pelatihan keterampilan jika dikembangkan mengingat beliau memang tidak pernah mengenyam pendidikan. Akibat keterbatasan yang dimilikinya tersebut, beliau merasa enggan untuk melakukan usaha-usaha produktif KSM sehingga partisipasinya dalam KSM menjadi terhambat.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Angba & Itari (2012) yang berfokus pada faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi partisipasi petani pada organisasi sosial di Obubra, Cross River State, Nigeria dimana dalam penelitian tersebut mereka menyimpulkan “petani miskin dan kurang berpendidikan, akan memiliki partisipasi rendah dalam sebuah organisasi sosial/kemasyarakatan”. Proses pendidikan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan (Notoatmodjo, 2009:27). Hal ini berarti ketika penerima manfaat kurang berpendidikan, mereka tidak akan memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan kegiatan produktif KSM sehingga partisipasi mereka pada KSM akan menjadi kurang efektif.

Selain tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya keterampilan yang dimiliki akibat minimnya pengetahuan dan pengalaman juga melatarbelakangi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi memiliki kesulitan untuk memasarkan produk usaha hasil pelatihan keterampilan sehingga kemudian berdampak pada tidak efektifnya partisipasi penerima manfaat pada KSM yang tercermin dari keengganan penerima manfaat untuk melakukan usaha-usaha produktif KSM.

Temuan di atas didukung dengan pendapat Slamet (dalam Mardikanto & Soebianto, 2013:91-95) yang mengungkapkan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya ditentukan oleh kemampuan masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan. Artinya, ketika penerima manfaat merasa tidak memiliki kemampuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan untuk menjalankan pekerjaan tertentu, yang dalam hal ini adalah memasarkan produk hasil pelatihan keterampilan, maka partisipasi mereka pada KSM menjadi tidak efektif. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang mengungkapkan bahwa “terdapat kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan” (Robbins, 2003:52).

Memasarkan produk usaha hasil pelatihan keterampilan seharusnya tidak menjadi penghambat penerima manfaat untuk berpartisipasi pada KSM sebab tenaga pendamping pelatihan memiliki tugas, diantaranya membantu memasarkan hasil produksi dan membantu mencari *link/jaringan* produksi dan pemasaran dari produk peserta latih yang tergabung dalam KSM sampai mereka mampu memasarkan hasil produknya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen tenaga pendamping pelatihan dalam program ini tergolong rendah. Sebagaimana yang telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya bahwa pendamping memiliki fungsi penting dalam kegiatan pemberdayaan, salah satunya adalah sebagai pelayan, yakni memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pemberdayaan.

Dalam konteks ini, sekali lagi menunjukkan rendahnya komitmen pendamping dalam Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak yang tercermin dari tenaga pendamping pelatihan tidak

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

menjalankan fungsinya sebagai pelayan yang memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pemberdayaan, terutama dalam hal membantu memasarkan produk dan mencari *link*/jaringan produksi dan pemasaran dari produk KSM binaannya sehingga penerima manfaat merasa kesulitan memasarkan produk usaha hasil pelatihan keterampilan. Padahal justru dalam proses ini kemampuan pendamping dibutuhkan, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki penerima manfaat masih terbatas. Maka logis jika dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penerima manfaat dalam memasarkan produk usaha hasil pelatihan keterampilan menjadi penghambat mereka untuk tidak berpartisipasi aktif pada KSM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada KSM di Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya adalah:

1. Adanya keyakinan penerima manfaat bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan dengan cara mengembangkan KSM menjadi kelompok usaha dengan produk hasil pelatihan keterampilan yang telah diberikan tidak akan mendatangkan manfaat ekonomi. Hal ini dikarenakan penerima manfaat melihat produk hasil pelatihan keterampilan memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang beredar di pasaran, yakni dalam hal ukuran, kualitas, harga, kemasan serta merek.
2. Gaya kepemimpinan kelompok yang tidak baik dan tidak demokratis. Hal ini tercermin dari pemimpin kelompok yang tidak berupaya membangkitkan motivasi anggota kelompoknya supaya berpartisipasi pada KSM, baik melalui ajakan dan/atau perintah untuk melakukan kegiatan produktif KSM serta tidak melaporkan adanya bantuan modal yang diterima KSM serta penggunaan modal bantuan tersebut kepada seluruh anggota kelompok.
3. Adanya sikap rendahnya kepercayaan diri penerima manfaat dalam menjalankan Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak yang tercermin dari adanya kepercayaan dalam diri penerima manfaat bahwa produk usaha hasil pelatihan keterampilan tidak akan mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran akibat adanya perbedaan dengan produk sejenis yang beredar di pasaran yakni dalam hal ukuran, kualitas, harga, kemasan serta merek.
4. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penerima manfaat dalam memasarkan produk usaha hasil pelatihan keterampilan yang diberikan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak.

5. Program Pemberdayaan Ekonomi di wilayah ini kurang tepat sasaran dan kurang terencana dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya penggantian penerima manfaat program pada saat pelaksanaan dan adanya ketidaksesuaian antara materi pelatihan keterampilan yang diinginkan/dibutuhkan oleh penerima manfaat dengan materi pelatihan keterampilan yang diberikan.
6. Rendahnya komitmen pendamping yang ditunjukkan dengan rendahnya kesediaan pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan pada KSM dan rendahnya kesediaan untuk membantu memasarkan produk usaha KSM di wilayah tersebut.

Saran

Bertitik tolak pada hasil dan pembahasan sebelumnya, peneliti mengajukan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar hasil Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dapat lebih efektif dan optimal. Adapun saran-saran yang diajukan, yakni:

1. Untuk Peneliti Lanjutan
Bagian dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, berupa tidak memaparkan bagaimana perumusan Program Pemberdayaan Ekonomi serta implementasinya di Kelurahan Kalianak yang ternyata turut memberikan pengaruh terhadap ketidakefektifan partisipasi penerima manfaat program pada KSM di Kelurahan Kalianak karena penelitian ini hanya difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi penerima manfaat pada KSM di wilayah tersebut.
2. Untuk Aplikasi Praktis
 1. Program Pemberdayaan Ekonomi kedepannya perlu lebih memperhatikan aspirasi dari penerima manfaat program sebab hal tersebut memiliki pengaruh terhadap keikutsertaan penerima manfaat pada program tersebut. Apabila Program Pemberdayaan Ekonomi yang diberikan berdasarkan pada aspirasi penerima manfaat, akan tumbuh keyakinan dalam diri penerima manfaat bahwa program ini dapat memberikan manfaat bagi dirinya sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk melibatkan diri dalam program tersebut sehingga capaian program pun akan optimal dan efektif.
 2. Pemilihan pemimpin kelompok sebaiknya didasarkan atas keinginan pribadi serta kesepakatan penerima manfaat yang menjadi anggota kelompok sehingga akan melahirkan rasa tanggung jawab, kepercayaan serta kedekatan hubungan pemimpin dengan anggota kelompoknya sehingga pemimpin akan mampu mengarahkan para anggotanya

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

untuk turut serta mencapai sasaran yang diinginkan, yakni meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian perempuan gakin melalui kelompok usaha bersama ini.

3. Pemilihan tenaga pendamping pelatihan harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan pengalaman yang dimiliki tenaga pendamping pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan guna mengetahui bagaimana komitmen tenaga pendamping pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan.
4. Program Pemberdayaan Ekonomi sebaiknya tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga memberikan pelatihan tambahan, seperti dasar-dasar keorganisasian dan pelatihan pemasaran sehingga penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan tenaga pendamping pelatihan untuk memasarkan produk usahanya.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi kedepannya perlu lebih memperhatikan Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi sehingga dapat meminimalisasi ketidakefektifan hasil program akibat adanya penggantian penerima manfaat dan penerima manfaat yang tidak sesuai sebagai kriteria sasaran.
6. Untuk meminimalisasi penerima manfaat yang tidak sesuai sasaran, proses verifikasi calon penerima manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi juga harus disesuaikan dengan data administrasi kependudukan terbaru.

Daftar Pustaka

- Ahmadu, Sule, Nobaya Ahmad, & Hanina H. Hamsan. 2012. 'Perspective on Beneficiaries Experiences of Participation In Community-Based Agriculture And Rural Development Program In Guba, Northern Nigeria'. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development Program*, vol. 2, no. 1, pp. 39-45, [Online], diakses 17/01/2014, pukul 14.21 WIB, tersedia di [http://search.proquest.com/docview/1416222973?accountid=31533].
- Angba, Augustine O. & Paul Itari. 2012. 'Socio-Economic Factors Influencing Farmer's Participation In Community Development Organizations In Obubra Local Government Area of Cross River State, Nigeria'. *Canadian Social Science*, vol. 8, no. 1, pp. 54-59, [Online], diakses 17/01/2014, pukul 14.27 WIB, tersedia di [http://search.proquest.com/docview/1019315244?accountid=31533].
- Arif, Syaiful. 2012. Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan Dan Demokrasi* oleh Happy Budi Febriasih [ed.]. Malang: Averroes Press.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. 2013. *Rekap KSM Pelatihan Bapemas dan KB Kota Surabaya*. Surabaya: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- . 2013. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Tahun 2013*. Surabaya: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2013. *Kecamatan Asemrowo dalam Angka 2012*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- . 2013. *Kecamatan Genteng dalam Angka 2012*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- . 2013. *Kecamatan Karang Pilang dalam Angka 2012*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- . 2013. *Kecamatan Lakarsantri dalam Angka 2012*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- . 2013. *Kecamatan Pabean Cantian dalam Angka 2012*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- BBA, Dip KIM, MBA Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Kenya. 2013. Impact of Women Participation In Self-Help Groups on Self Economic Empowerment In Nakuru County Sambu Charity Chepchirchir. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Bussines*, vol. 5, no. 4, pp. 382-405, [Online], diakses 07/02/2014, pukul 15.09 WIB, tersedia di [http://search.proquest.com/docview/1440185424?accountid=31533].
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nadhir, M. 2009. *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*. Lamongan: YAPSEM.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P2KP. 2012. *Modul Khusus Komunitas Relawan/BKM/Lurah/UP Mengembangkan Memelihara KSM* [Online], diakses 31/01/2014, pukul 21.00 WIB, tersedia di [http://www.p2kp.org/pustaka/files/petunjuk_teknis_2012/petunjuk_teknis_pengembangan_ksm.pdf].
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh*. Diterjemahkan oleh Benyamin Molan tahun 2007. Jakarta: PT Indeks.
- Sastropoetro, Santoso. 1986, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumnus.

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

- Sutrisno, Edi. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, Istiqomah. 2009. Sikap. *Psikologi Sosial* oleh Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno [eds.] tahun 2009, hlm.79-102. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yukl, Gary. 2001. *Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi Kelima*. Diterjemahkan oleh Budi Supriyanto tahun 2010. Jakarta: PT Indeks.

